

PENATAAN KAWASAN WISATA ALAM SEBAGAI DESTINASI WISATA MINAT KHUSUS DI KABUPATEN MALINAU

Indro Sulistyanto

Abstrak

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki eksotisme keindahan alamnya adalah Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Malinau merupakan kabupaten terbesar di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Berbagai pariwisata alam yang dimiliki oleh kabupaten Malinau, seperti Arus Liar yang ada di Sungai Tugu dan sungai Bahaowulu, Air Terjun Martin Bila, Air Panas Semolon, rumah adat asli dari masyarakat Malinau atau biasa di sebut Lamin Adat. Ada juga kuburan batu yang sudah ada beratus-ratus tahun lalu.

Digelarnya berbagai event yang mampu mempromosikan potensi wisata Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberi implikasi pada peningkatan pengunjung yang datang ke Kabupaten Malinau. Pada sisi lain sangat diperlukan adanya peningkatan dukungan dan perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap kekayaan objek wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau potensi yang ada mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga apabila dapat dieksplorasi dengan bijak, diharapkan akan banyak membawa keuntungan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Kata Kunci : *Kawasan Wisata Alam, Destinasi Wisata, Minat Khusus, Kabupaten Malinau*

Malinau merupakan Kabupaten yang memproklamirkan diri sebagai Kabupaten Konservasi, dengan demikian wisatawan dapat menikmati berbagai kekayaan flora dan fauna yang tidak dimiliki daerah lain. Pada sisi lain juga tempat penelitian laut Birai, tempat penelitian flora dan fauna Kain Mentarang.

1. LATAR BELAKANG

Perlu upaya besar dalam meningkatkan animo masyarakat dalam menikmati objek-objek wisata di Kabupaten Malinau, mengingat jumlah wisatawan yang datang masih sangat sedikit. Kebanyakan wisatawan yang datang adalah peneliti asing, sekitar 20 orang pertahun. Demikian pula dengan wisatawan domestik yang relatif masih sedikit untuk melakukan kunjungan wisata. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dibutuhkannya waktu yang relatif lama

untuk sampai di objek-objek wisata di Kabupaten Malinau, terlebih jika melalui jalur darat. Wisatawan dari luar wilayah Kabupaten Malinau harus melalui Bandara Internasional di Balikpapan, selanjutnya harus transit dulu di Tarakan baru melanjutkan dengan pesawat kecil untuk sampai di Kabupaten Malinau. Kalau melalui jalur darat, dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) butuh waktu 24 jam. Dan itu juga harus menggunakan jalur lalu-lintas yang berat.

Pariwisata yang semula disebut turisme mempunyai makna kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Definisi ini kemudian berkembang menjadi "... suatu (kegiatan) perjalanan seseorang dari tempat asalnya ke suatu tempat/ lingkungan yang berbeda dengan kondisi lingkungan asalnya untuk suatu tujuan tertentu seperti rekreasi, bisnis, silaturahmi/

kunjungan keluarga atau tujuan lainnya, yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam serta memanfaatkan unsur-unsur pendukung/ fasilitas penunjang kepariwisataan (al: transportasi, akomodasi, rumah makan, hiburan, dstnya)... “.

Berdasarkan data tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia telah mencapai sekitar 6,4 Juta kunjungan, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17% dari tahun sebelumnya. Angka kunjungan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dari angka tersebut, telah menghasilkan nilai devisa mencapai 7,4 Juta USD. Perolehan devisa ini juga merupakan pencapaian tertinggi bidang pariwisata (dari pembelanjaan wisman) dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan yang dicapai juga sangat signifikan mencapai 38% pada tahun 2008. Pencapaian nilai devisa ini pula yang menyebabkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sangat penting. Kedudukan sektor pariwisata berada di urutan ke-3 sebagai kontributor perolehan devisa nasional, setelah migas dan minyak kelapa sawit.



Gambar 1
Fasilitas Pelabuhan dan Bandara Tarakan
sebagai Fasilitas Interkoneksi Menuju
Kabupaten Malinau



Gambar 2
Sarana Potensial Menuju Kabupaten
Malinau dengan Pesawat Kecil,
karena Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Bandara di Kabupaten Malinau

Pariwisata yang semula disebut turisme mempunyai makna kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Definisi ini kemudian berkembang menjadi “... suatu (kegiatan) perjalanan seseorang dari tempat asalnya ke suatu tempat/ lingkungan yang berbeda dengan kondisi lingkungan asalnya untuk suatu tujuan tertentu seperti rekreasi, bisnis, silaturahmi/ kunjungan keluarga atau tujuan lainnya, yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam serta memanfaatkan unsur-unsur pendukung/ fasilitas penunjang kepariwisataan (al: transportasi, akomodasi, rumah makan, hiburan, dstnya) ...”.

Berdasarkan data tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia telah mencapai sekitar 6,4 Juta

kunjungan, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17% dari tahun sebelumnya. Angka kunjungan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dari angka tersebut, telah menghasilkan nilai devisa mencapai 7,4 Juta USD. Perolehan devisa ini juga merupakan pencapaian tertinggi bidang pariwisata (dari pembelanjaan wisman) dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan yang dicapai juga sangat signifikan mencapai 38% pada tahun 2008. Pencapaian nilai devisa ini pula yang menyebabkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sangat penting. Kedudukan sektor pariwisata berada di urutan ke-3 sebagai kontributor perolehan devisa nasional, setelah migas dan minyak kelapa sawit.

Tabel-1

Kontribusi Devisa dari Sektor Pariwisata dibandingkan dengan Sektor Lainnya, Tahun 2004-2008 (dalam juta USD)

| | SECTOR | 2004 | SECTOR | 2005 | SECTOR | 2006 | SECTOR | 2007 | SECTOR | 2008 |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 1 | Oil & Gas | 15,59 | Oil & Gas | 19,23 | Oil & Gas | 21,21 | Oil & Gas | 22,09 | Oil & Gas | 27,71 |
| 2 | Tourism | 4,70 | Garments | 4,96 | Garments | 5,61 | Plam Crude oil | 7,87 | Plam Crude oil | 11,64 |
| 3 | Garments | 4,27 | Tourism | 4,52 | Processed Rubber | 5,46 | Processed Rubber | 6,18 | Tourism | 7,37 |
| 4 | Electricity equipment | 3,41 | Electricity equipment | 4,36 | Plam Crude oil | 4,82 | Garments | 5,71 | Garments | 5,25 |
| 5 | Textile | 3,23 | Plam Crude oil | 3,76 | Electricity equipment | 4,45 | Tourism | 5,35 | Electricity equipment | 4,68 |
| 6 | Plam Crude oil | 3,23 | Textile | 3,70 | Tourism | 4,45 | Electricity equipment | 4,84 | Textile | 3,84 |
| 7 | Processed Rubber | 3,14 | Processed Rubber | 3,54 | Textile | 3,32 | Textile | 4,18 | Processed paper | 3,52 |
| 8 | Processed wood | 2,85 | Processed wood | 3,08 | Processed wood | 2,86 | Chemical | 3,40 | Processed food | 2,75 |

Sumber : BPS 2009, Pengolahan Studio 2012

Bagi Indonesia juga negara-negara Asia pada umumnya, krisis keuangan dapat dikatakan belum berdampak buruk. Namun demikian, kondisi ini perlu disikapi dengan berbagai perencanaan dan strategi yang matang. Di sektor pariwisata krisis keuangan selain perlu diwaspadai dampaknya, juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk memposisikan diri sebagai

destinasi wisata alternatif (murah) khususnya bagi wisatawan Intra Asia (antar negara-negara di Asia).

Saat ini Indonesia hanya memiliki 3 pintu masuk utama yang mampu menampung pesawat-pesawat berbadan lebar yang merupakan maskapai-maskapai asing, dan menempuh penerbangan jarak jauh. Ketiga pintu masuk tersebut adalah Jakarta, Batam,

dan Bali. Bali merupakan pintu masuk dengan jumlah kedatangan wisatawan

terbanyak (32%), kedua adalah Jakarta (21%), dan ketiga adalah Batam (20%).



Gambar 3
Tiga Pintu Masuk Utama Wisman Tahun 2008
 Sumber : www.bps.go.id, 2009; Pengolahan Studio 2012

Pola ketergantungan terhadap akses masuk tersebut juga berpengaruh terhadap pola distribusi wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar wisatawan mancanegara di Indonesia masih terkonsentrasi di 3 wilayah pintu masuk tersebut, khususnya kota-kota besar di Jawa, sedangkan di daerah-daerah lain relatif sangat terbatas.

Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait mengkait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Dalam lingkup global, pariwisata sebagai industri yang berkembang pesat telah mencatat angka lebih kurang 715 juta

perjalanan internasional yang menghasilkan lebih dari US\$ 475 triliun dari pengeluaran wisatawan. Dengan pertumbuhan pariwisata global rata-rata 4% pertahunnya, *World Tourism Organisation (WTO)* atau badan pariwisata dunia memperkirakan bahwa mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka 1 milyar wisatawan pada tahun 2010. WTO lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia didalamnya) akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi diantara kawasan-kawasan lain di dunia.

Prospek yang sangat strategis sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Malinau sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar dan beragam. Dalam konteks tersebut diatas, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan.

2. STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN MALINAU

Digelarnya berbagai event yang mampu mempromosikan potensi wisata Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberi implikasi pada peningkatan pengunjung yang datang ke Kabupaten Malinau. Pada sisi lain sangat diperlukan adanya peningkatan dukungan dan perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap kekayaan objek wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau potensi yang ada mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga apabila dapat dieksplorasi dengan bijak, diharapkan akan banyak membawa keuntungan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai upaya memasarkan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Malinau, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Malinau. Disbudpar Kabupaten Malinau telah merencanakan langkah-langkah strategis terkait dengan pengembangan industri wisata pada 4 wilayah pengembangan (WP) Kabupaten Malinau yang telah tercantum dalam Master Plan Pengembangan Budaya Dan Wisata yang disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Universitas Mulawarman Tahun 2010.

Dalam Master Plan diperoleh gambaran tentang arah dan strategi pengembangan pariwisata pada masing-masing Wilayah Pengembangan yang ada di Kabupaten Malinau. Adapun strategi pengembangan pariwisata Semolon yang ada di Wilayah Pengembangan (WP)-II tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan strategi pengembangan wisata di WP-I, sebagai berikut:

a. Wilayah Pengembangan (WP)-I: meliputi Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Utara terdapat sedikitnya 28 destinasi wisata baik berupa tempat wisata alam, situs, cagar budaya, termasuk unsur-unsur

seni dan budaya yang ada di dalamnya. Beberapa destinasi yang ada di WP-I, terdiri atas: kolam-kolam penangkaran dan pemeliharaan ikan (Malinau Kota), Taman Rekreasi Hutan Pinus, Air Panas Mangku Asar dan Air Terjun Sungai Gita (Malinau Barat), Bukit Marthin Billa, Air Terjun Sembolot (Malinau Utara). Beberapa destinasi wisata di WP-I ini terletak di wilayah perkotaan ditunjang oleh fasilitas dan sarana lain yang relatif sudah cukup lengkap, seperti: hotel, penginapan, dan restoran.

WP I memang punya karakteristik yang lebih, antara lain aksesibilitas yang cukup terjangkau (Jhonson Lilit, 2011). Ada sejumlah strategi khusus untuk pengembangan di WP I, yakni pembentukan sebuah “Desa Budaya” Kabupaten Malinau yang merupakan representasi seni dan budaya dari seluruh etnis yang ada. Mempromosikan dan menjadikan Museum Malinau sebagai pusat informasi (show room) bagi semua objek dan daya tarik wisata seluruh kecamatan, termasuk menggelar seni pertunjukan sekurangnya 1 kali dalam sebulan di tempat tersebut, dengan melakukan penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan pengembangan aset seni dan wisata. Selanjutnya, dilakukan revitalisasi terhadap aset seni dan budaya yang sudah hampir terlupakan, membangun wisata kuliner, membentuk paket-paket wisata, mengadakan festival, memfasilitasi pembentukan sanggar-sanggar seni, dan promosi yang dilakukan dengan berbentuk media (audio-visual).

b. Wilayah Pengembangan (WP)-II: mencakup 3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaitu Kecamatan Mentarang, Mentarang Hulu, dan Malinau Selatan. Di WP II ini terdapat sekitar 19 destinasi wisata yang berada di sekitar Sungai Mentarang, Sungai Malinau dan Sungai Tubu. Beberapa destinasi yang ada di WP II ini antara lain yaitu

arung jeram Sungai Tubu, Semolon Hot Waterfall (Mentarang), Jeram Belau, Air Terjun Kembar (Mentarang Hulu), Tana Olen Setulang dan Air Terjun Marthin Billa (Malinau Selatan) serta sejumlah destinasi lainnya. Meski tidak sebanyak di WP I, sejumlah fasilitas penunjang, transportasi, hotel dan penginapan di WP ini pun, sudah tersedia. Adapun strategi yang disiapkan untuk pengembangan di WP II ini, antara lain yaitu promosi sumber Air Panas Semolon dan Tana Olen Setulang sebagai ikon pariwisata di WP II. Membuat perda atau surat edaran agar bagian hukum sungai yang memiliki air terjun potensial tetap dipertahankan. Membangun fasilitas penunjang dan infrastruktur ke lokasi wisata, seperti ke Semolon, mengadakan festival, dan membentuk paket-paket wisata ke beberapa destinasi yang ada di WP II. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Kabupaten Malinau, maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai strategi pengembangan wisata di WP-II, pada dasarnya harus terkoneksi dengan baik dengan strategi pengembangan di WP-I. Dengan demikian aksesibilitas yang nantinya akan dibangun dari dan menuju ke Semolon harus terencana dengan baik sehingga tercipta koneksi wisata yang lancar, aman, dan nyaman bagi wisatawan untuk menikmati seluruh destinasi wisata yang direncanakan pada masing-masing Wilayah Pengembangan Wisata di WP-I maupun WP-II.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan dalam perencanaan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Malinau akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena metode penelitian ini menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabuhkan penggunaan angka.

Secara umum tujuan pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malinau terdiri atas tercapainya pertumbuhan (*growth*), pemetaan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*) dimana konsep pendekatan perencanaan, mengacu pada pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dimana manifestasi strategi implementasinya bisa kedalam berbagai tingkatan, nasional regional atau pada level kawasan.

Pengembangan pariwisata Kawasan Semolon harus mampu mempertahankan keberlangsungan hidup (*sustainability*) sumber – sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam (*natural resources*) seperti panorama alam, kondisi topografi, flora dan fauna serta iklim maupun aneka sumberdaya budaya (*cultural resources*) yang berupa budaya fisik dan budaya non fisik (*living culture*). Selain itu, pengembangan pariwisata kawasan Semolon juga harus mampu memberikan pertumbuhan baik pertumbuhan lokal (*local growth*) pada level komunitas dan pertumbuhan secara menyeluruh dalam kepariwisataan Kabupaten Malinau (*regional growth*).

Dalam Penyusunan Perencanaan dan Study Kelayakan Semolon, pendekatan perencanaan yang digunakan, meliputi:

- a. Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)
- b. Pendekatan *Good Tourism Governance*
- c. Pendekatan Kesesuaian antara Permintaan dan Penawaran (*Demand and Supply*)
- d. Pendekatan Pengembangan Wilayah
- e. Pendekatan Budaya
- f. Pendekatan Ekowisata
- g. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Based Tourism*)

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Dari pembahasan terhadap kemungkinan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malinau di masa mendatang diperoleh gambaran arah perkembangannya di masa mendatang, dengan mengem-

bangkan destinasi-destinasi unggulan yang ada.

4.1. Malinau Menuju Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan the Brundtland Report) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 (Mowforth dan Munt 1998). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Singkat kata, dengan pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya.

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan.

Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu, menurut *United Nations Environment Programme on Tourism*, *sustainable tourism* merupakan pengembangan pariwisata yang mempertemukan antara kebutuhan wisatawan pada saat ini dengan tetap

mempertimbangkan, melindungi dan mempertinggi potensi asset untuk masa yang akan datang. Hal ini juga berarti mempertimbangkan potensi masa yang akan datang dalam segala sektor, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dipenuhi, yang didukung oleh sistem integrasi kebudayaan, proses ekologi yang esensial, keragaman biologi, dan life support.

Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu akan selalu memiliki pengaruh terhadap semua aspek pembangunan pada suatu wilayah, berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*), maupun efek ikutan (*induced effect*). Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program – program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan:

- Layak secara ekonomi (*economically visible*)
- Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*)
- Diterima secara sosial (*socially acceptable*)
- Dapat diterapkan secara teknologis (*tecnologically appropriate*)

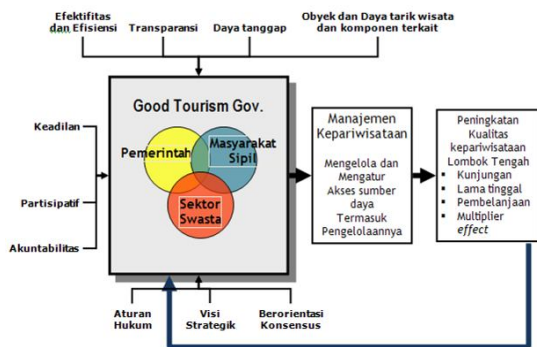


Gambar 4
Pendekatan *Good Tourism Governance*

Istilah “governance” sudah dikenal dalam *literature* Administrasi Dan Ilmu Politik Hamper 120 Tahun, wacana tentang *governance* dalam pengertian yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk dari tata

pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah atau pengelolaan pemerintah, tata pamong. Setelah berbagai lembaga pembiayaan menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan meraka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ; istilah “*good governance*” telah diterjemahkan ke berbagai istilah, misalnya ; penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintarao Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ada tiga pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni : pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adab, masyarakat madani , masyarakat sipil) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.



Gambar 5
Diagram Good Tourism Governance Model

Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang beribawa dan memiliki visi yang jelas.

4.2. Pariwisata Malinau yang Mampu Menyesuaikan antara Permintaan dan Penawaran (*Demand And Supply*)

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, maka akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai.

Pendekatan *Demand and Supply* dilakukan melalui pasar wisatawan (domestik dan mancanegara) yang akan menuntut barang/obyek yang baik, yang disertai dengan pelayanan yang baik. Disamping obyek wisata yang menarik, obyek tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memuaskan wisatawan. Wisatawan akan menuntut pelayanan transportasi yang baik, akomodasi yang baik, hiburan yang segar, makanan – minuman yang menarik sesuai selera, dan pelayanan lain – lainnya. Jika *supply* (obyek wisata) sudah ditingkatkan dan dikemas dengan baik sesuai dengan tuntutan permintaan pasar (wisatawan), maka dapat diperkirakan bahwa arus wisatwan akan meningkat di masa depan.

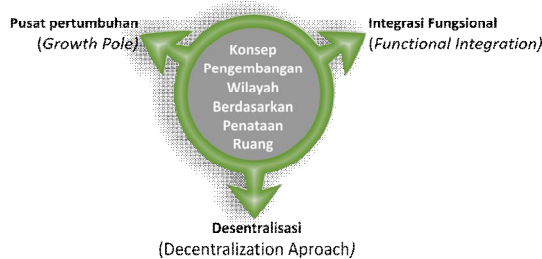


Gambar 6
Diagram Kesesuaian Permintaan dan Penawaran

4.3. Pariwisata Malinau dan Konteks Pengembangan Wilayah

Tiga konsep utama pengembangan wilayah yang mengacu pada penataan ruang yaitu pusat pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional (*functional integration*) dan pendekatan desentralisasi (*decentralization approach*) merupakan

teori yang relevan untuk diterapkan dalam program pengembangan pariwisata.



Gambar 7
Konsep Pengembangan Wilayah Berdasar pada Penataan Ruang

Sebagai sebuah komoditi, pariwisata dimaksudkan menjadi penggerak kegiatan perekonomian wilayah dalam pengertian yang luas, sehingga perlu disediakan secara lengkap fasilitas – fasilitas pelayanan regional untuk memfasilitasinya.

4.4. Pariwisata Malinau yang Mengakar pada Budaya

Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai asset budaya masyarakat, baik berupa tata nilai, adat – istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai – nilai/norma – norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat – istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari – hari yang dilakukan berdasar tata nilai yang dianut dan yang berlaku.

Dr. Heddy Shri Ahimsa – Putra (2000) menjelaskan bahwa pengembangan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup obyek wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur – unsur lain yang terkait di dalamnya, yang juga tidak dapat diabaikan, jika pengembangan tersebut diinginkan keberhasilannya. Paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata

budaya; (1) pengembangan obyek wisata itu sendiri; (2) pengembangan paket wisata budaya; (3) pengembangan pelayanan wisata budaya ; (4) pengembangan promosi wisata budaya tersebut. Tiga hal ini terkait satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan.

4.5. Pariwisata Malinau sebagai Ekowisata

Rumusan 'ecotourism' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sebagai berikut:

"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."

"Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini."

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari pada *eco – traveler*.

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah

alami. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan.

4.6. Pariwisata Malinau yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Community-based tourism merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dari pariwisata yang menyatukan dampak aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dari pariwisata. Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan “ *community-based tourism* ” (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni *adventure travel* , *cultural travel* dan *ecotourism*.

CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.

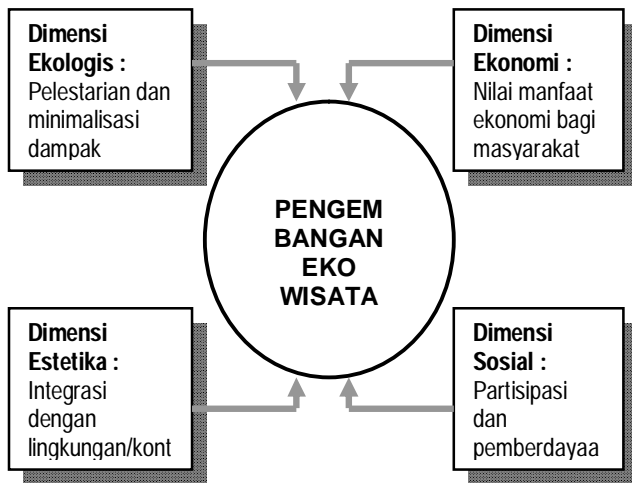


Gambar 8
Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

5. KESIMPULAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA MALINAU

Dari hasil kajian atas berbagai upaya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Malinau, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malinau, dicapai melalui:
 - Pendekatan pengembangan melalui konsep **Pariwisata Berkelanjutan** (*sustainable tourism development*)
 - Pendekatan perencanaan **bertumpu pada skala Komunitas Lokal** (*Local Community Based Development*)
 - Pendekatan pengembangan melalui konsep **Keterpaduan Sisi Permintaan dan penawaran** (*demand and supply matching*)
 - Pendekatan pengembangan **melalui konsep Ekowisata** (*Ecotourism*)



Gambar 9
Konsep Pengembangan Ekowisata
(*Ecotourism*)

- b. Pengembangan ekowisata bagi eluruh destinasi wisata di Kabupaten Malinau harus direncanakan dan dikembangkan berdasarkan aspek-aspek strategis sebagai berikut:

- **Aspek ekologis**, mencakup program pengelolaan wisata ekologis dengan sasaran terpeliharanya ekosistem melalui pengendalian optimal jumlah/besaran pengunjung pada suatu kawasan. Termasuk sistem pengendalian polusi/limbah dan elemen-elemen pendukungnya (daur ulang sampah, daur ulang air, pemakaian bahan non-kimia), pengendalian sistem drainase, konservasi aspek biotis (flora dan fauna) serta habitatnya.
- **Aspek estetikal z-keindahan**, berorientasi pada pengembangan aspek-aspek estetis pembangunan fisik fasilitas-fasilitas penunjang wisata. Dalam hal ini diperhatikan prinsip keselarasan dan harmoni dengan karakter alam/lingkungan hidup dalam perencanaan dan pembangunan terkait dengan unsur lingkungan alam/berada pada lingkungan alami. Hal-hal yang tercakup adalah bentuk dan ekspresi bangunan, penggunaan

bahan dan material alami serta sistem teknologi bangunan.

▪ **Aspek ekonomi**, pada dasarnya berorientasi memperoleh manfaat ekonomi yang tinggi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa aspek ekonomi bukan diukur dari pendapatan yang diperoleh, tetapi pada pelestarian jangka panjang.

▪ **Aspek sosial**, terkait dengan pendekatan partisipatori, yaitu melibatkan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan wisata. Pendekatan secara langsung akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi maupun peningkatan kemampuan sumber daya lokal untuk secara aktif terlibat dalam pengembangan kegiatan wisata

6. DAFTAR PUSTAKA

- Berry, B.J.L., dan Horton, B.B., *Geographic Perspectives on Urban Systems*, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970
- Brunn, S.D., dan Williams, J.F., *Cities of the World: Regional Urban Development*, Harper & Row, New York, 1983
- Bryant, C. and White, L.G., *Managing Development in the Third World*. Boudier, Colorado : Westview Press., 1982
- Chapin, Jr., F.S., dan Kaiser, E.J., *Urban Landuse Planning*, Third Edition, University of Illinois, 1979
- Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Model Analisis Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Laut*, 2008

Departemen Kelautan dan Perikanan,
Direktorat Jenderal Kelautan
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil, ***Panduan
Analisis Penentuan Pusat-pusat
Pengembangan di Wilayah
Pesisir dan Laut***, 2008

Indro Sulistyanto, ***Pengaruh
Perkembangan Penduduk
terhadap Semakin Berkurangnya
Lahan-Lahan Produktif***, Bappeda
Kabupaten Magelang, 2006

Jayadinata, JL., ***Tata Guna Tanah dalam
Perencanaan Pedesaan,
Perkotaan dan Wilayah***, Penerbit
ITB, 2006

Pemerintah Kabupaten Berau, ***Rencana
Umum Tata Ruang Kabupaten***,
2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2010 tentang ***Pedoman
Pengelolaan Sampah***

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.70/Menhut-II/2008 tentang
***Pedoman Teknis Rehabilitasi
Hutan dan Lahan***, 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2008 tentang
Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
Nomor 76 tentang: ***Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan***, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

Biodata Penulis :

Indro Sulistyanto, Alumni S1 Jurusan
Teknik Arsitektur UGM Yogyakarta
(1982), Pasca Sarjana (S2) Program
Magister Teknik Universitas Atmajaya
Yogyakarta (1999). Dosen pada Program
Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik
UTP Surakarta Tahun 1985 sampai
sekarang. Pernah menjabat sebagai Ketua
Jurusan Arsitektur , dan Dekan Fakultas
Teknik UTP Surakarta.